

Upaya Pembebasan Sandera WNI

TENGGAT waktu 8 April 2016 yang diterapkan kelompok teroris Abu Sayyaf di Filipina Selatan terlewati.

Tidak terjadi pemberian tebusan 50 juta peso (Rp 15 miliar) oleh PT Patria Maritim Line (tempat 10 sandera warga negara Indonesia / WNI bekerja) maupun oleh Pemerintah Indonesia ataupun otoritas Filipina kepada kelompok penyandera. Juga, tanpa terjadi pembunuhan terhadap para sandera. Dan, tak kalah penting kelompok penyandera bersedia mengulur waktu negosiasi lebih lanjut bagi upaya pembebasan 10 anak buah kapal (ABK) Brahma 12.

Ilu semua terjadi berkat (salah satunya) soft diplomasi yang ditempuh pemerintah. Sejak mengetahui terjadi penyanderaan terhadap 10 ABK Brahma 12 dirompak dan disandera kelompok Abu Sayyaf 26 Maret, Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk melobi Pemerintah Filipina. Perintah guna merundingkan langkah-langkah yang perlu ditempuh demi pembebasan sandera.

Perunding Khusus

Selain itu pemerintah membentuk tim perunding khusus agar dapat melakukan perundingan dengan kelompok Abu Sayyaf yang kini dipimpin Khadafi Janjalani (adik kandung Abdulrajaik Janjalani, pendiri Kelompok Abu Sayyaf tahun 1991). Tim perunding khusus terdiri dari aparat pemerintah terutama dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), tiga mantan tokoh teroris yang (pernah) menjalin hubungan dengan kelompok Abu Sayyaf, dan sejumlah tokoh masyarakat Indonesia di Filipina Selatan. Menurut Staf Ahli Deputi Pencegahan BNPT Wawan Purwanto, pembentukan tim perunding khusus dengan menyertakan/melibatkan mantan tokoh teroris maupun tokoh masyarakat Indonesia di Filipina Selatan terutama di Provinsi Basilan, kepulauan Sulu dan Jolo diperlukan guna membuka dialog langsung dengan kelompok Abu Sayyaf. Pasalnya, kelompok sempalan Moro National Liberation Front (MNLF) pimpinan Nur Misuari itu tidak bersedia berunding dengan Pemerintah Indonesia

Chusnan Maghribi

dengan kelompok Abu Sayyaf.

Lalu, bagaimana apabila hasil *soft diplomacy* ini tidak optimal atau bahkan gagal? Akankah dilakukan operasi militer gabungan Indonesia-Filipina?

Konstitusi Filipina tidak mengizinkan militer asing memasuki territori jurisdiksinya tanpa perjanjian bilateral. Sementara operasi militer Filipina di Basilan (9/4/16) gagal bahkan merenggut nyawa 18 anggota pasukan khusus Filipina. Boleh jadi operasi militer gabungan Indonesia-Filipina menjadi opsi terbaik yang mestii ditempuh andai hasil *soft diplomacy* pembebasan sandera WNI tidak optimal bahkan gagal.

Sukses maupun gagal *soft diplomacy* Indonesia dalam upaya pembebasan sandera WNI, sejatinya operasi militer gabungan Indonesia-Filipina untuk menumpas kelompok Abu Sayyaf perlu dilakukan. Passalnya, kelompok Abu Sayyaf sejauh ini terbukti membuat militer Filipina kedodoran sekaligus menjadi ancaman nyata bagi keamanan Masyarakat ASEAN. □·k

*)*Chusnan Maghribi, Alumnus Hubungan Internasional FISIP UMY.*

Pojok KR

Gara-gara iklan 'Parkour' di Borobudur, disomasi.

- Mari kita juga candi kebanggaan ini.

'Panama Papers', sejumlah potensi ekonomi hilang.

- Kepada pemiliknya, pemerintah harus tegas.

2019, semua wilayah DIY teraliri listrik.

- Kenapa masih nunggu sampai tiga tahun?

Berita